



:: LAPORAN KEUANGAN BPK

Pemkot Pertahankan Status Wajar Tanpa Pengecualian

YOGYAKARTA - Laporan keuangan pemerintah kota (Pemkot) Yogyakarta dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP). Meskipun masih ada paragraf penjelasan tentang aset Terminal Giwangan yang masih proses hukum. Selain itu masih ada tiga lainnya yang mendapat perhatian. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta Tutik Sulastri mengatakan, dalam laporan keuangan ini, pihaknya akan terus melakukan perbaikan. "Kami harus terus memperbaiki, terutama kaitannya dengan Terminal Giwangan," kata Tutik kemarin.

Kendati demikian pihaknya optimis opini WTP akan tetap diperoleh, dan tidak berubah menjadi wajar dengan pengecualian (WDP), meskipun kasus Terminal Giwangan belum selesai. Untuk langkah selanjutnya pemkot masih akan menunggu dari hasil pengadilan.

Kepala Perwakilan BPK DIY Sunarto dalam pidatonya mengatakan, opini WTP bukan tujuan akhir. "WTP bukan tujuan akhir dari pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, opini WTP tidak menjamin bahwa laporan keuangan bebas dari kecurangan," katanya.

Ia menambahkan Pemkot Yogyakarta memiliki empat paragraf penjelasan, naik dari tahun sebelumnya di mana hanya dua paragraf penjelasan. Keempat paragraf penjelasan untuk opini WTP laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2012 tersebut meliputi kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk kerja sama bangun guna serah atau "built operate transfer" (BOT) Terminal Giwangan, penyajian investasi nonpermanen, penggunaan langsung lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta penggunaan langsung retribusi daerah.

Paragraf penjelasan mengenai Terminal Giwangan juga menjadi paragraf penjelasan pada opini WTP laporan keuangan tahun anggaran 2010 dan 2011. Sedangkan paragraf penjelasan tentang aset tetap yang

belum dilakukan penyusutan yang muncul pada opini WTP tahun anggaran 2011 sudah berhasil diperbaiki Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sunarto mengatakan, paragraf penjelasan tersebut tidak akan mempengaruhi penilaian BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, apalagi permasalahan Terminal Giwangan sudah masuk dalam ranah hukum dan kini sedang dalam proses di Mahkamah Agung (MA).

"Meskipun demikian, paragraf paragraf penjelasan tersebut harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Perlu disikapi dan jangan dibiarkan," katanya.

"Kami harus terus memperbaiki, terutama kaitannya dengan Terminal Giwangan."

TUTIK SULASTRI
Sekda Kota Yogyakarta

Selain Kota Yogyakarta, dua kabupaten lain di DIY juga memperoleh opini WTP yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, sedang dua kabupaten lain yaitu Kulonprogo dan Gunungkidul masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). "Kabupaten Bantul berhasil memperbaiki laporan keuangannya dari opini WDP tahun lalu, menjadi WTP tahun ini," kata Sunarto.

Meskipun demikian, opini WTP untuk Bantul dan Sleman juga masih disertai paragraf penjelasan, yaitu untuk Bantul mengenai penyajian investasi nonpermanen atau dana bergulir dan penyajian belanja bantuan keuangan alokasi dana desa. Sedangkan Sleman mengenai penggunaan langsung penerimaan unit produksi SMK sebagai belanja.

winda.sulistiyorini
/ant

Ig. Trihastono, S.Sos., MM

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005